

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 KEPADA SEMBILAN PEMERINTAH DAERAH

Pontianak, Selasa (6 Juni 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 6 Juni 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada sembilan entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M**, bertempat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LKPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan 3 (tiga) buah buku laporan yang memuat: 1) laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, 2) laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan 3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap sembilan entitas, terdapat tujuh entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan dua entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketujuh entitas tersebut adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mempawah. Opini tahun lalu Kabupaten Mempawah adalah WDP, namun seiring dengan berbagai upaya dan perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, pada tahun ini BPK dapat memberikan opini WTP. Sedangkan dua entitas lain opininya masih tetap masih WDP yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Sambas. Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemda yang memperoleh opini WTP.

Pencapaian opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

laporan keuangannya. Pengelolaan aset di beberapa pemda yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran, walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materialitas yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan entitas yang mendapatkan opini WDP. Permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah masalah pengelolaan aset daerah yang belum memadai, antara lain aset tetap yang masih belum ada nilai perolehannya, aset yang pencatatannya digabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset, di lain pihak masih juga ada pencatatan aset terutama dari hasil rehab atas aset, yang pencatatannya dipisahkan dari aset perolehan awalnya. Pada beberapa entitas masih ditemukan permasalahan aset yang tidak dapat diketahui dan ditelusuri keberadaannya dan aset-aset yang rusak masih tercatat dalam daftar aset tetap, serta ada juga hasil pengadaan aset yang bersumber dari berbagai jenis bantuan seperti BOS yang belum dicatat.

Selain permasalahan aset, permasalahan lain yang hampir sama di tiap entitas adalah permasalahan pengelolaan Dana BOS dan dana sejenisnya yang disalurkan melalui Provinsi, yang disalurkan langsung ke sekolah sekolah negeri milik Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02, penerimaan dan penggunaan dana, aset tetap yang dihasilkan dan saldo dana yang masih tersisa tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Khusus untuk penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian beban-beban sesuai klasifikasi dalam laporan operasional. Beberapa entitas belum mencatat penerimaan dan penggunaan dana tersebut atau menyajikannya secara global belum dirinci ke masing-masing bebannya. Apabila pengelolaan dana-dana bantuan yang langsung diterima oleh sekolah tersebut, tidak disajikan sesuai SAP maka karena nilainya material akan berdampak terhadap opini yang diberikan oleh BPK.

Untuk permasalahan kepatuhan terhadap perundang-undangan antara lain masih terjadi kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran atas kegiatan, kelebihan pembayaran tenaga langsung/honor kegiatan, pengelolaan pajak dan retribusi yang belum sesuai ketentuan serta pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial serta dana desa yang belum sesuai ketentuan.

Menanggapi peristiwa baru baru ini di BPK Pusat, terkait dengan adanya dugaan jual beli opini, perlu ditegaskan bahwa selama ini BPK Perwakilan Kalimantan Barat, dalam memberikan opini betul-betul setelah melalui proses yang cukup panjang dan profesional serta tanpa ada iming-iming atau kompensasi dengan jumlah tertentu dari entitas. Proses penentuan opini yang diberikan oleh BPK Perwakilan Kalbar dilakukan secara berjenjang. Setelah tim melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut dibahas oleh Tim Reviu Opini Perwakilan yang sudah memperoleh sertifikasi dari Pusdiklat BPK. Untuk opini entitas yang perlu persetujuan BPK Pusat seperti opini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemeriksaan yang menggunakan tenaga pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan opini yang meningkat menjadi WTP atau turun dari WTP. Untuk memberikan opini atas hasil pemeriksaan tersebut, maka hasil pembahasan di perwakilan diusulkan ke pusat untuk direviu oleh Tim Reviu BPK Kantor Pusat.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com